

Menilai Preferensi Publik atas Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Menggunakan Pendekatan Eksploratif

Assessing Public Preferences for Local Government Information Transparency Using an Exploratory Approach

**Naufal Afif¹, Suci Nasehati Sunaningsih², Herlina Manurung³,
Martiana Riawati Utami⁴✉, Ferdi Rahmat Kurniawan⁵,
Erika Novia Lestari⁶**

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia.

✉ *Corresponding author.* martiana.riawati@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai preferensi publik terhadap keterbukaan informasi pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dan pertanyaan lanjutan, serta dua pertanyaan terbuka dari 51 responden yang berasal dari masyarakat umum. Instrumen penelitian menggunakan skala persepsi dari “sangat tidak penting” hingga “sangat penting” disertai alasan terbuka yang dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan perhatian tinggi terhadap dimensi institusional dan keuangan, khususnya terkait penyediaan laporan keuangan, transparansi anggaran, serta kejelasan visi, misi, dan struktur organisasi pemerintah daerah. Tema dominan yang muncul adalah perlunya penyampaian informasi dengan bahasa yang sederhana, tampilan *website* yang mudah diakses, dan pembaruan informasi secara berkala.

Abstract

This study aims to assess public preferences regarding local government information disclosure using an exploratory approach. Data were collected through structured interviews using questionnaires and follow-up questions, as well as two open-ended questions from 51 respondents from the general public. The research instrument used a perception scale ranging from “very unimportant” to “very important” accompanied by open reasons that were analyzed using a thematic analysis approach. The results showed that the public paid high attention to institutional and financial dimensions, particularly related to the provision of financial reports, budget transparency, and clarity of the vision, mission, and organizational structure of local government. The dominant themes that emerged were the need for information to be conveyed in simple language, an accessible website, and regular updates.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2026 Naufal Afif, Suci Nasehati Sunaningsih, Herlina Manurung, Martiana Riawati Utami, Ferdi Rahmat Kurniawan, Erika Novia Lestari.

Article history

Received 2025-12-18

Accepted 2026-01-05

Published 2026-01-31

Kata kunci

Keterbukaan
Informasi Publik;
Transparansi
Pemerintah Daerah;
Preferensi Publik;
Literasi Digital;
Analisis Tematik

Keywords

*Public information
disclosure;
Local government
transparency;
Public preferences;
Digital literacy;
Thematic analysis*

PENDAHULUAN

Transparansi informasi di pemerintah daerah, khususnya kaitannya dengan keuangan daerah, telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik diyakini mempengaruhi keterbukaan informasi keuangan kepada publik (Syamsul & Ritonga, 2017). Masyarakat yang sudah semakin modern juga menuntut akses yang lebih besar terhadap informasi tentang pengelolaan keuangan publik, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Di Indonesia, tata kelola pemerintahan seringkali diwarnai oleh isu korupsi dan kurangnya akuntabilitas, menjadikan transparansi informasi menjadi bagian yang sangat krusial. Terlebih menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara sepanjang periode 2005-semester I 2023 sebesar Rp4,89 triliun dan sebagian besar berada pada pemerintah daerah (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024). Oleh karena itu, masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan. Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi, masih terdapat kesenjangan antara informasi yang disediakan oleh pemerintah dengan pemahaman masyarakat tentang informasi tersebut.

Riset terdahulu menjelaskan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik, namun hanya jika informasi yang diberikan tersebut dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat (Bertot et al., 2010). Hasil ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menemukan bahwa transparansi yang efektif memerlukan kemudahan akses dan pemahaman oleh publik, dan tidak hanya ketersediaan informasi saja (Bilal, 2017; Setyanto et al., 2025). Sehingga informasi yang dimiliki dan dibuka ke publik, harus benar-benar yang dapat dipahami oleh masyarakat dan dapat dengan mudah. Hal ini pula yang menyebabkan banyaknya pelayanan daring tidak dapat dilaksanakan dengan optimal (Tui et al., 2022).

Penelitian terdahulu, lebih lanjut menjelaskan bahwa jenis informasi dan cara penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah daerah akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah (Cucciniello et al., 2015). Pengaruh ini didasari oleh preferensi dan pemahaman masyarakat terhadap jenis dan cara penyampaian informasi tersebut. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana masyarakat menilai transparansi informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah akan kesulitan dalam memanfaatkan informasi yang ada pada lama website pemerintah daerah (Olii et al., 2025). Hal serupa disimpulkan oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa transparansi keuangan secara signifikan akan mempengaruhi kepercayaan publik dengan mempertimbangkan berbagai preferensi yang bervariasi di masyarakat, khususnya terkait dengan format yang mudah dipahami masyarakat, sehingga informasi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik (Adiputra et al., 2018; Armstrong, 2011).

Studi ini berkontribusi pada literatur yang ada mengenai transparansi dan keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah. Penelitian terdahulu telah banyak yang membahas mengenai transparansi yang menunjukkan hubungan antara transparansi dan kepercayaan publik (Adiputra et al., 2018; Bertot et al., 2010; S. G. Grimmelikhuijsen, 2010; Krah & Mertens, 2020). Namun belum banyak yang menyoroti bagaimana preferensi masyarakat di Indonesia mengenai jenis informasi seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini juga berkontribusi pada pemerintah secara praktis dengan memberikan rekomendasi bagi dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana preferensi masyarakat terhadap transparansi informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Studi ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam melakukan pengujian empiris terkait preferensi masyarakat. Pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden berupa survei yang digunakan untuk mengetahui bagaimana preferensi mereka atas jenis

informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tujuan yang akan diukur meliputi, (1) Preferensi terhadap jenis informasi: Jenis informasi keuangan dan pelayanan publik seperti apa yang dianggap penting oleh Masyarakat. (2) Tingkat akses dan pemahaman: Sejauh mana masyarakat merasa memiliki akses terhadap informasi tersebut dan seberapa baik mereka memahami informasi yang diberikan.

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan untuk menganalisis hubungan antara transparansi dan kepercayaan publik, namun ada beberapa hal yang belum banyak dilakukan oleh studi terdahulu. Misalnya, dalam studi terdahulu cenderung fokus pada tingkat transparansi secara umum tanpa memperhatikan preferensi masyarakat terhadap jenis informasi tertentu (Grimmelikhuijsen, 2012). Penelitian transparansi keuangan pemerintah daerah dalam konteks preferensi masyarakat akan informasi yang diberikan masih terbatas, misalnya pada penelitian Cucciniello et al. (2015 dan Song & Lee (2016) yang menjelaskan bahwa preferensi Masyarakat perlu dibentuk untuk menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah daerah.

Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian-penelitian sebelumnya dengan fokus pada preferensi masyarakat terhadap jenis informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

METODE

Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu setiap individu dalam populasi dapat dipilih menjadi responden (Cooper & Schindler, 2014). Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling sebagai penentuan sampel.

Kriteria sampel yang dibutuhkan untuk pendekatan kuantitatif adalah masyarakat yang pernah mengakses website resmi pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dengan usia minimal 18 tahun. Sama halnya untuk pendekatan kualitatif, responden yang digunakan adalah Masyarakat yang juga pernah mengakses website resmi pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan cara survei dengan wawancara. Calon responden yang memenuhi kriteria akan diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai yang ditanyakan oleh pewawancara. Responden yang dipilih adalah mereka yang telah memiliki pengetahuan dasar tentang keuangan dan/atau mereka yang telah sering menggunakan website pemerintah untuk memperoleh informasi maupun melakukan transaksi.

Pertanyaan kuesioner dimulai dengan pertanyaan demografi (domisili, umur, jenis kelamin, pekerjaan, website pemerintah yang sering dikunjungi) dan pertanyaan tentang frekuensi responden dalam menggunakan internet dan mengunjungi website pemerintah. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan terkait preferensi Masyarakat tentang informasi yang disampaikan pemerintah daerah melalui website. Responden diminta untuk menjawab sesuai opini pribadi mereka dengan rentang skala 1 (Sangat Kurang Penting) hingga 10 (Sangat Penting).

Di setiap pertanyaan dan juga akhir sesi, pewawancara mengajukan pertanyaan lanjutan atas jawaban yang diberikan oleh responden. Hal ini dilakukan untuk menggali lebih dalam informasi mengenai preferensi Masyarakat dan alasan mereka berdasarkan jawaban yang diberikan. Setiap interview yang dilakukan direkam dan dianalisis menggunakan Teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema kunci yang berhubungan dengan preferensi informasi yang diinginkan oleh Masyarakat atas transparansi pemerintah daerah (Östlund et al., 2011).

Analisis Data

Data kuantitatif dari wawancara akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik dari responden. Selanjutnya untuk data yang

diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk dapat mengidentifikasi pola dan isu dari preferensi responden. Kombinasi dari hasil kuantitatif dan kualitatif ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai preferensi Masyarakat mengenai informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden pada riset ini sejumlah 51 orang, komposisi laki-laki (50,98%) dan perempuan (49,02%) menunjukkan keseimbangan dalam persepsi terhadap keterbukaan informasi publik. Mayoritas responden berada pada rentang usia produktif 26–50 tahun, dengan dominasi pendidikan sarjana (50,98%) dan diploma (23,53%). Kondisi ini mencerminkan bahwa partisipan memiliki kapasitas literasi digital dan kemampuan analitis yang cukup baik untuk menilai informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, sebagian besar responden berasal dari sektor publik (92,16%), menunjukkan keterlibatan langsung dengan birokrasi serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dari sisi perilaku digital, responden cenderung aktif menggunakan internet, dengan separuhnya (50,98%) mengakses lebih dari 8 jam per hari dan 43,14% mengunjungi situs pemerintah daerah lebih dari satu kali sehari. Frekuensi tinggi ini menunjukkan bahwa mereka memiliki akses yang baik terhadap informasi daring, termasuk informasi publik yang disediakan pemerintah. Kebiasaan penggunaan media sosial selama lebih dari 3 jam per hari juga memperlihatkan kecenderungan responden untuk menginginkan bentuk komunikasi publik yang cepat, interaktif, dan mudah diakses, seperti halnya pola informasi pada platform digital populer (Kemp, 2025).

Secara keseluruhan, profil responden ini mendukung dua tujuan penelitian utama. Pertama, preferensi masyarakat terhadap jenis informasi publik cenderung mengarah pada informasi yang bersifat transparan, faktual, dan berhubungan langsung dengan kinerja serta pelayanan publik pemerintah daerah (Gale, 2019). Kedua, tingkat akses dan pemahaman yang tinggi terhadap internet menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai dan memanfaatkan informasi publik dengan baik.

Sebanyak 24 pertanyaan tertutup dengan jawaban 1 (Sangat Kurang Penting) hingga 10 (Sangat Penting) ditanyakan kepada responden seperti pada Tabel 1. Empat dimensi yang diamati dalam 24 pertanyaan tersebut mengandung pemaknaannya masing-masing. Dimensi-dimensi tersebut antara lain dimensi institusional, dimensi politik, dimensi keuangan (fokus pada informasi finansial) dan dimensi keuangan (fokus pada karakteristik kualitatif). Berdasarkan perhitungan rata-rata untuk seluruh pertanyaan, hasil yang diperoleh hampir seluruhnya memiliki nilai yang cukup tinggi pada rentang 6,4 sampai 9,05. Sedangkan, jika dilihat pada rata-rata tiap dimensi, berada pada rentang 7,11 sampai dengan 8,86. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai semua bentuk keterbukaan informasi pemerintah daerah sebagai suatu hal yang penting.

Tabel 1. Pertanyaan dan Analisis Deskriptif

Dimensi	Pertanyaan	Mean	SD
Dimensi Institusional	Memberikan nomor telepon atau alamat pos	8,96	1,48
	Memberikan pernyataan misi visi dan berbagai kegiatan lembaga	9,00	1,39
	Menyediakan struktur organisasi dalam bentuk grafik	8,65	1,72
Dimensi Politik	Memberikan informasi tentang cara menghubungi Walikota/Bupati	7,78	2,43
	Memberikan informasi tentang biaya/pengeluaran/gaji Walikota/Bupati	6,43	2,78
Dimensi Keuangan (Informasi Finansial)	Menyediakan laporan keuangan konsolidasi	8,31	1,48
	Menyediakan laporan audit	8,73	1,55
	Menyediakan angka perbandingan periode saat ini dan periode sebelumnya	8,67	1,31
	Menyediakan laporan neraca	8,61	1,78
	Menyediakan informasi tentang aset tetap non-finansial seperti tanah dan bangunan	7,98	2,28

Dimensi	Pertanyaan	Mean	SD
	Menyediakan informasi tentang aset tetap finansial, seperti saham, reksadana, obligasi	7,18	2,69
	Menyediakan informasi kewajiban jangka panjang	8,08	2,03
	Menyediakan informasi tentang alokasi antar periode	8,78	1,63
	Menyediakan catatan atas laporan keuangan	8,71	1,42
	Menyediakan anggaran terkini	8,86	1,47
	Menyediakan laporan pelaksanaan anggaran	9,06	1,55
	Menyediakan indikator aktivitas efisiensi- produktivitas-kinerja	8,55	1,30
	Menyediakan indikator kinerja efektivitas	8,59	1,33
	Menyediakan indikator kinerja ekonomi	8,29	2,08
	Menyediakan umpan balik tentang indikator efisiensi- produktivitas-kinerja	9,00	1,31
	Menyediakan komentar tentang informasi keuangan	8,71	1,65
Dimensi Keuangan	Menyediakan rasio tambahan, grafik, atau gambar cadangan	8,27	1,42
(Pemahaman Karakteristik Kualitatif)	Memberikan informasi keuangan tahunan minimal 3 tahun	8,59	1,31
	Memberikan ringkasan perbandingan	8,76	1,44

Dimensi institusional mendapatkan nilai rerata tertinggi (8,87) diantara seluruh dimensi. Hasil ini mengisyaratkan bahwa informasi kelembagaan menjadi poin terpenting bagi masyarakat. Pernyataan visi dan misi bupati/walikota dan wakil bupati/walikota yang termuat dalam website pemerintah kabupaten/kota menjadi yang tertinggi pada dimensi ini (mean = 9,00), disusul dengan penyediaan nomor telepon, alamat kantor, alamat pos, atau kontak lainnya milik lembaga (8,96) dan terakhir struktur organisasi pemerintah (8,65). Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan, masyarakat telah setuju bahwa komponen-komponen dalam dimensi ini telah ada dan mudah diakses oleh setiap orang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa posisi dan lokasi tempat visi dan misi diletakkan akan berdampak pada kesadaran, pengetahuan, penggunaan, dan perilaku masyarakat (Kipasika, 2024; Radzilani & Ayandibu, 2021). Hal ini mengindikasikan pentingnya visi/misi, kontak, dan struktur organisasi yang disajikan oleh pemimpin daerah dan juga kepala dinas/lembaga. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa informasi kelembagaan dasar dapat membangun kepercayaan publik dan citra institusional. Visi dan misi kepala daerah yang dicantumkan dalam website dan diturunkan dalam kebijakan setiap organisasi pemerintah daerah mencerminkan tata kelola kolaboratif yang baik yang akan memunculkan kepercayaan publik (Tulie et al., 2025).

Nilai rerata tertinggi kedua ada pada dimensi keuangan yang berfokus pada pemahaman karakteristik kualitatif (mean 8,54). Dimensi ini mencakup pemberian ringkasan perbandingan keuangan pemda (8,76), informasi keuangan tahunan dalam kurun waktu minimal 3 tahun (8,59), dan adanya rasio, grafik, serta gambar hasil pengolahan data (8,27). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan adanya transparansi yang ditunjukkan dengan mengunggah laporan keuangan pemerintah daerah saja, melainkan juga bagaimana informasi tersebut mudah dipahami dan bermakna bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa masyarakat senang dengan adanya laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diakses dengan mudah, namun mereka juga berharap lebih pada pemberian informasi yang lebih mudah untuk dipahami (misalnya gambar komparatif) (Haustein & Lorson, 2023).

Dimensi ketiga masih berkorelasi dengan dimensi sebelumnya, yang mana pada dimensi ini lebih spesifik ke informasi finansial pemerintah daerah. Skor pada dimensi ini adalah 8,51. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah merasa bahwa pemerintah telah berupaya untuk menyajikan berbagai laporan keuangan dan informasi anggaran secara terbuka. Item penyediaan laporan pelaksanaan anggaran menjadi yang tertinggi di antara seluruh item pertanyaan pada semua dimensi dengan rerata 9,06. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah memiliki perhatian yang serius terhadap transparansi keuangan publik, yang menjadi inti dari prinsip akuntabilitas pemerintahan

daerah (Swastika et al., 2024; Syafaruddin, 2024). Masyarakat menilai bahwa adanya semua unsur dari laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting adanya, karena terkait transparansi.

Namun, alasan mengapa nilai pada dimensi ini tidak setinggi dimensi sebelumnya adalah karena masyarakat merasa ada tantangan yang lebih untuk dapat memahami laporan keuangan pemerintah daerah jika dilihat satu laporan secara utuh. Hal ini sesuai dengan penelitian Hausteine & Lorson (2023) yang menjelaskan bahwa masyarakat menuntut untuk penyederhanaan format dalam laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Riset ini sejalan dengan jawaban responden yang merasa bahwa sebagian besar masyarakat kemungkinan tidak akan melihat neraca yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, karena keterbatasan kemampuan dalam membaca dan menganalisis laporan tersebut.

Dimensi dengan nilai rata-rata terendah adalah dimensi politik (7,11). Meskipun pertanyaan terkait informasi cara menghubungi kepala daerah melalui berbagai media sudah relatif baik (7,78), namun transparansi terkait biaya, pengeluaran, atau gaji pejabat publik masih dianggap kurang penting (mean 6,43). Hasil ini mengindikasikan bahwa aspek politik masih menjadi area yang kurang terbuka. Hal ini didukung oleh pernyataan responden yang menyampaikan bahwa gaji kepala daerah tidak perlu disampaikan secara langsung di dalam website, cukup dengan peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan peraturan ini sudah dapat diakses melalui laman resmi Kabupaten/Kota. Kaitannya dengan cara menghubungi kepala daerah, responden juga memberikan tanggapan bahwa media sosial pejabat atau kepala daerah akan lebih mudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat daripada membubuhkan nomor atau cara-cara untuk menghubungi Bupati/Walikota di dalam website.

Selanjutnya, jika dilihat dari deviasi standar untuk masing-masing pertanyaan dapat menggambarkan atau memberikan indikasi atas beberapa hal. Pertama, deviasi standar (2,78) yang cukup tinggi pada indikator biaya/gaji kepala daerah mengindikasikan bahwa terdapat nilai yang ekstrem dibandingkan dengan rerata (mean 6,43) indikator ini. Nilai ekstrem ini berasal dari jawaban angka 1 yang menunjukkan bahwa transparansi biaya/gaji kepala daerah dirasa sangat tidak penting untuk ditampilkan dalam website. Namun di sisi lain, ada beberapa responden lain yang juga menjawab bahwa biaya/gaji ini perlu ditampilkan sebagai suatu bentuk akuntabilitas.

Aspek kedua yang menjadi perhatian adalah terkait pemahaman masyarakat pada komponen pada laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun nilai rata-rata pada dimensi keuangan (antara 7-9), namun standar deviasi yang dimiliki juga cukup tinggi pada rentang 2,2 hingga 2,7 khususnya pada pertanyaan seputar aset finansial, aset non-finansial, dan informasi mengenai kewajiban atau hutang pemerintah daerah. Nilai standar deviasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi dari masyarakat belum merata. Masih ada masyarakat yang merasa bahwa pencantuman nilai aset tidak penting karena bukan kewenangan dari instansi, namun di sisi lain banyak yang menganggap bahwa ini penting. Meskipun demikian, jika melihat pada aturan yang ada, seharusnya pemerintah daerah dalam laporan keuangan daerahnya memasukkan nilai aset finansial dan non finansial. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa ada masyarakat yang belum memahami dengan baik keterbukaan informasi melalui laporan keuangan pemerintah daerah.

Aspek ketiga yang menjadi perhatian dari nilai deviasi standar adalah masyarakat hampir seluruhnya setuju bahwa kemudahan informasi yang diberikan menjadi salah satu hal yang penting. Misalnya dalam pertanyaan tentang penyediaan perbandingan nilai periode saat ini dengan sebelumnya, sebaran data yang dihasilkan cukup terkonsentrasi dengan nilai deviasi standar 1,3. Artinya hampir seluruh masyarakat setuju bahwa hal ini penting untuk dimunculkan pada website pemerintah daerah.

Sesi wawancara diakhiri dengan menanyakan dua pertanyaan terbuka. Pertanyaan pertama menanyakan tentang apakah ada saran yang masyarakat bisa berikan untuk meningkatkan pemahaman informasi di website pemerintah daerah. Secara ringkas jawaban untuk pertanyaan pertama tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Pertanyaan Terbuka 1

No.	Tema Utama/ Keyword	Frekuensi	Makna Kontekstual	Kutipan Representatif Responden
1	Bahasa mudah dipahami / sederhana	32	Bahasa terlalu birokratis dan teknis dianggap menghambat pemahaman publik. Dan berharap website memakai bahasa yang umum dan komunikatif.	“Gunakan bahasa yang sederhana dan bahasa rakyat, hindari bahasa yang terlalu birokratis atau teknis.”
2	Tampilan dan desain visual menarik	18	Tampilan website perlu lebih rapi, menarik, dan sederhana agar tidak membingungkan pengguna.	“Tampilannya harus simpel dan rapi, jangan terlalu ramai.” / “Visualnya kurang menarik, perlu diperbaiki agar lebih transparan.”
3	Kemudahan akses / user-friendly	15	Website harus mudah diakses, termasuk dari HP, dengan navigasi sederhana dan loading ringan.	“Website-nya harus mudah diakses dan tidak berbelit-belit.” / “Harus bisa diakses di handphone, desainnya rapi dan mudah dipahami.”
4	Informasi jelas dan ringkas	14	Informasi sebaiknya hanya memuat poin-poin penting, tidak terlalu banyak teori atau teks panjang.	“Tampilkan yang penting-penting saja agar mudah dipahami.” / “Informasi jangan bertele-tele, cukup garis besarnya.”
5	Infografis, gambar, atau video	11	Visualisasi informasi membantu masyarakat memahami data keuangan atau kinerja secara cepat.	“Informasi ditampilkan dalam bentuk grafik atau bagan.” / “Tambahkan video agar masyarakat lebih paham maksudnya.”

Berdasarkan analisis tematik atas jawaban responden, topik yang paling sering diamati adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Lebih dari 30 responden menyatakan bahwa bahasa di situs web pemerintah daerah sebaiknya tidak terlalu formal, teknis, atau birokratis. Masyarakat lebih menyukai informasi yang disajikan dalam bahasa sehari-hari yang ringkas, padat, dan jelas, sehingga semua orang, termasuk mereka yang berpendidikan terbatas, dapat dengan mudah memahami isinya.

Lebih lanjut, sekitar 18 responden menekankan pentingnya tampilan dan desain situs web yang menarik, rapi, dan ramah pengguna. Situs web yang terlalu rumit, berat, atau penuh teks panjang dianggap dapat mengurangi minat pengguna. Banyak responden lainnya menyarankan agar situs web pemerintah dibuat lebih sederhana dan ramah pengguna, dengan menambahkan fitur visual seperti grafik, infografis, dan video untuk membantu pemahaman.

Isu lain yang sering diangkat adalah kemudahan akses dan penyebaran informasi. Masyarakat menginginkan situs web yang mudah digunakan di ponsel mereka dan menyediakan informasi terkini dan relevan. Beberapa responden juga menyebutkan pentingnya desain, warna, dan sosialisasi yang aktif agar masyarakat umum dapat menggunakan situs web. Secara umum, responden menginginkan situs web pemerintah daerah lebih aman, informatif, menarik secara visual, dan komunikatif agar dapat secara efektif mempromosikan partisipasi publik.

Pertanyaan terbuka yang kedua adalah “Menurut anda, informasi apa yang paling penting untuk ditampilkan di website pemerintah daerah? Jelaskan alasan anda”. Frekuensi kata kunci yang muncul berdasarkan jawaban responden tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Pertanyaan Terbuka 2

No	Tema / Keyword Utama	Frekuensi	Makna Kontekstual	Kutipan Representatif Responden
1	Transparansi & Keuangan Daerah (APBD, LRA, Anggaran)	27	Masyarakat menganggap informasi keuangan daerah sebagai inti transparansi publik. Mereka ingin tahu dari mana uang berasal, digunakan untuk apa, dan sejauh mana realisasinya.	"Yang paling utama adalah APBD dan LKPJ, supaya masyarakat tahu program apa saja yang dijalankan." / "Anggaran penting supaya masyarakat tahu uang daerah dipakai untuk apa."
2	Program, Kegiatan, & Kinerja Pemerintah	23	Responden menilai informasi kegiatan dan capaian pemerintah membantu masyarakat menilai kinerja dan kemanfaatan program.	"Informasi kegiatan pemerintah agar masyarakat tahu apa yang dilakukan." / "Program kerja pemerintah harus ditampilkan lengkap dengan progresnya."
3	Visi, Misi, & Rencana Kerja Pemerintah Daerah	17	Informasi visi dan misi dianggap penting agar masyarakat memahami arah pembangunan daerah serta tujuan kebijakan pemerintah.	"Visi dan misi kepala daerah penting supaya masyarakat tahu arah pembangunan." / "Harus ada rencana kerja lima tahunan dan jangka panjang."
4	Pelayanan Publik & Tata Cara Layanan	15	Website diharapkan menjadi panduan layanan publik seperti pembayaran pajak, perizinan, bantuan sosial, dan kontak pelayanan.	"Yang perlu ditampilkan tentang pelayanan dan pembayaran pajak." / "Jenis pelayanan apa saja dan cara mengaksesnya harus jelas."
5	Aduan, Aspirasi, & Call Center	10	Masyarakat ingin ruang komunikasi dua arah agar bisa menyampaikan keluhan, saran, atau laporan secara langsung ke pemerintah.	"Nomor telepon aduan cepat sangat penting." / "Harus ada ruang pengaduan dan aspirasi publik."

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan daerah merupakan kebutuhan fundamental publik. Banyak responden menggaris bawahi pentingnya penyajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Kinerja agar publik dapat memahami bagaimana dana publik digunakan. Kutipan seperti "Anggaran penting supaya masyarakat tahu uang daerah dipakai untuk apa" mencerminkan kekhawatiran dan harapan publik akan pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan dan mudah diakses, bebas dari kendala birokrasi. Transparansi bukan sekadar angka saja, namun transparansi juga tentang membangun kepercayaan, yang merupakan sumber daya sosial yang semakin dihargai oleh warga negara.

Lebih lanjut, inisiatif, tindakan, dan kinerja pemerintah merupakan topik kedua yang paling sering disebutkan. Bagi masyarakat umum, mengamati inisiatif yang sedang berlangsung lebih dari sekadar informasi, ini merupakan representasi konkret dari janji dan arah kebijakan daerah. Ketika pemerintah menampilkan capaian dan kemajuan program, publik merasa lebih terlibat dalam proses pembangunan. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu responden, "Program kerja pemerintah harus ditampilkan lengkap dengan progresnya" yang menekankan bahwa keterlibatan publik didasarkan pada transparansi informasi yang berkelanjutan. Keinginan masyarakat akan saluran aspirasi, layanan publik yang jelas, dan berita terkini menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari dialog pembangunan, bukan sekadar penonton. Situs web pemerintah daerah tidak lagi sekadar pajangan dokumen formal. Situs web tersebut harus menjadi ruang hidup bagi warga, tempat untuk mencari layanan, menyuarakan pendapat, dan memahami arah kemajuan kota mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap 51 responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki tingkat perhatian yang tinggi terhadap keterbukaan informasi publik, khususnya pada dimensi institusional dan keuangan. Dimensi institusional memperoleh nilai tertinggi menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting kejelasan visi-misi, struktur organisasi, serta ketersediaan kontak lembaga dalam situs web pemerintah daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa informasi kelembagaan dasar berperan besar dalam membangun kepercayaan dan citra positif pemerintah di mata publik.

Selanjutnya, pada dimensi keuangan baik yang berfokus pada informasi finansial maupun pada karakteristik kualitatif, masyarakat menilai transparansi laporan keuangan dan kemudahan pemahaman sebagai faktor penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah. Mereka tidak hanya menuntut keterbukaan data, tetapi juga penyajian informasi yang mudah dipahami melalui grafik, infografis, atau ringkasan. Sebaliknya, dimensi politik menunjukkan skor terendah, mencerminkan bahwa transparansi di bidang ini masih dianggap kurang relevan atau sensitif untuk ditampilkan.

Berdasarkan analisis tematik pertanyaan terbuka, ditemukan bahwa masyarakat menginginkan situs web pemerintah daerah yang bahasanya sederhana, tampilannya menarik dan mudah diakses, serta informasinya ringkas dan mutakhir. Topik yang paling penting bagi masyarakat adalah informasi keuangan daerah serta program dan kinerja pemerintah. Dengan demikian, kedua tujuan penelitian telah tercapai dengan menunjukkan bahwa publik kini lebih menuntut transparansi yang komunikatif, informatif, dan mudah diakses secara digital.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diberikan, pertama Bagi pemerintah daerah yaitu penyederhanaan bahasa dan tampilan situs web, penggunaan infografis, video, dan ringkasan visual agar informasi keuangan tidak hanya transparan tetapi juga *meaningful* bagi pengguna awam. Bagi instansi atau organisasi perangkat daerah terkait diperlukan strategi sosialisasi digital yang aktif hingga ke tingkat kelurahan atau RT/RW untuk memastikan masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi situs web pemerintah daerah. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel seperti tingkat literasi digital, atau menguji hubungan antara keterbukaan informasi publik dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur mengenai keterbukaan informasi publik di era digital dengan menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya persoalan ketersediaan data, tetapi juga keterpahaman dan aksesibilitas informasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi komunikasi publik berbasis digital yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bahwa peningkatan transparansi digital perlu dibarengi dengan peningkatan *user experience* dan *literasi informasi publik* masyarakat. Pendekatan komunikasi publik yang humanis dan adaptif akan memperkuat partisipasi warga dalam pengawasan dan pembangunan daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah responden masih terbatas, yang sebagian besar berasal dari sektor publik, sehingga persepsi masyarakat umum belum sepenuhnya terwakili. Kedua, data diperoleh melalui survei persepsi dan wawancara singkat, sehingga tidak sepenuhnya menangkap konteks pengalaman nyata masyarakat dalam mengakses situs web pemerintah. Ketiga, penelitian ini belum menguji hubungan kausal antar variabel, seperti antara tingkat literasi digital dan pemahaman informasi keuangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah dan variasi responden, menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), serta melibatkan analisis konten terhadap situs web pemerintah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik keterbukaan informasi publik.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu dan memberikan pandangan berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LPPM Universitas Tidar atas dukungan pendanaan dan fasilitas penelitian yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138.
- Aldridge, D. (1989). Music, Communication and Medicine: Discussion Paper. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 82(12), 743–746.
- Armstrong, C. L. (2011). Providing a clearer view: An examination of transparency on local government websites. *Government Information Quarterly*, 28(1), 11–16.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024, Februari 27). *Kerugian Negara/Daerah Paling Banyak Terdapat di Pemda – WARTA DIGITAL*. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=47833>
- Barrett, M. S. (2016). Attending to “culture in the small”: A narrative analysis of the role of play, thought and music in young children’s world-making. *Research Studies in Music Education*, 38(1), 41–54. <https://doi.org/10.1177/1321103X15603557>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government information quarterly*, 27(3), 264–271.
- Bilal, J. (2017). Ensuring transparency and access to information in the management of public institutions through e-government. *Proceedings of the 11th International Management Conference: The Role of Management in the Economic Paradigm of the Xxist Century (Imc 2017)*, 88–98.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods*. The McGraw– Hill Companies.
- Cucciniello, M., Belle, N., Nasi, G., & Valotti, G. (2015). Assessing public preferences and the level of transparency in government using an exploratory approach. *Social Science Computer Review*, 33(5), 571–586.
- Dunbar-Hall, P. (2000). Concept or Context? Teaching and Learning Balinese Gamelan and the Universalist-Pluralist Debate. *Music Education Research*, 2(2), 127–139. <https://doi.org/doi.org/10.1080/14613800050165604>
- Gale, W. G. (2019). Government at a Glance. In *Fiscal Therapy* (hal. 17–32). <https://doi.org/10.1093/oso/9780190645410.003.0002>
- Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: An experiment. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 50–73.
- Grimmelikhuijsen, S. G. (2010). Transparency of public decision-making: Towards trust in local government? *Policy & Internet*, 2(1), 5–35.
- Haustein, E., & C. Lorson, P. (2023). Transparency of local government financial statements: Analyzing citizens’ perceptions. *Financial Accountability & Management*, 39(2), 375–393.
- Kemp, S. (2025). *Digital 2025: Global Overview Report — DataReportal – Global Digital Insights*. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>
- Kipasika, H. J. (2024). Expression of leadership mission, vision, values, and strategic objectives in academic institution development practices. *Journal of Research Innovation and Implications in Education*, 8(1), 393–402.

Naufal Afif, Suci Nasehati Sunaningsih, Herlina Manurung, Martiana Riawati Utami, Ferdi Rahmat Kurniawan, Erika Novia Lestari

- Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency in local governments: patterns and practices of twenty-first century. *State and Local Government Review*, 52(3), 200–213.
- López, J. Á. L. (2021). Music creation in the film process. A critical approach. *Fonseca Journal of Communication*, 22, 173–188. <https://doi.org/10.14201/fjc-v22-23477>
- Mendonça, M. (2010). Gamelan in Prisons in England and Scotland: Narratives of Transformation and the “Good Vibrations” of Educational Rhetoric. *Ethnomusicology*, 54(3), 369–394.
- Olii, R. A., Tue, N., Bakari, S., & Pakaji, L. (2025). 3T Dampak Transformasi Digital Terhadap Efektivitas Layanan Administrasi Publik di Daerah 3T. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v12i1.1636>
- Östlund, U., Kidd, L., Wengström, Y., & Rowa-Dewar, N. (2011). Combining qualitative and quantitative research within mixed method research designs: a methodological review. *International journal of nursing studies*, 48(3), 369–383.
- Pretković, M., & Škrinjarić, T. (2017). Reviving Javanese Picture Scroll Theatre. *Etnološka tribina*, 47(40), 198–221. <https://doi.org/10.15378/1848-9540.2017.40.08>
- Radzilani, T. T., & Ayandibu, A. O. (2021). Investigating the Congruency of Vision, Mission and Motto Statements on Strategic Intent and Allegiance of National Departments in South Africa. *Journal of Public Administration*, 56(4), 898–914.
- Setyarto, D. B., Alimuddin, A., Mulyaningsih, M., & Judijanto, L. (2025). The role of e-government in increasing transparency and accountability of public administration in the digital era. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), 1771–1783.
- Song, C., & Lee, J. (2016). Citizens’ use of social media in government, perceived transparency, and trust in government. *Public Performance & Management Review*, 39(2), 430–453.
- Swastika, A. F., Wibawa, S., Metrolitania, M., Marvin, J., & Natalia, N. (2024). Enhancing Local Government Accountability through Good Governance Policies: A Mixed-Methods Study. *Law and Economics*, 18(3), 122–131.
- Syafaruddin, S. (2024). Examining the Role of Leadership in Improving Transparency and Accountability in Local Government. *International Journal of Economics and Management Research*, 3(2), 131–146.
- Syamsul, S., & Ritonga, I. T. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris Pada Pemerintah Provinsidi Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 448–460.
- Tui, F. P., Ilato, R., & Katili, A. Y. (2022). Inovasi pelayanan publik melalui E-government di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo. *Publik: jurnal manajemen sumber daya manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(2), 254–263. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.338>
- Tulie, E., Aneta, A., Aneta, Y., & Sulila, I. (2025). Dinamika Collaborative Governance dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Provinsi Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v12i1.1743>